

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Bemby B.S dan AbduL B, 2015). Kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi secara optimal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk melakukan ini, penting untuk menekankan salah satu bidang yang memiliki potensi pertumbuhan terbesar, karena ini dapat meningkatkan dan mendorong industri lain yang terkait. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, sektor lain akan terpolarisasi, menciptakan lapangan kerja baru.

Potensi strategi pembangunan yang ada akan lebih terarah jika pemerintah daerah atau siapapun yang melakukan usaha di daerah tersebut memiliki kesadaran yang mendalam tentang maksud dan tujuan pembangunan serta kekuatan dan keterbatasan suatu daerah. Dengan menekankan pada kebijakan pemerintah daerah yang mendukung usaha, keunggulan daerah, dan prospek potensi daerah, maka rencana pengembangan potensi ekonomi daerah harus dibuat sesuai dengan peluang dan potensi daerah (Ramdani M.S dan Ria H, 2022).

Kontribusi yang besar harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan mengetahui komoditas mana yang menjadi komoditas unggulan, karena komoditas unggulan dapat memberikan *multiplier effect* untuk sektor lain sehingga dengan diketahui komoditas unggulan diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat (Setiani Y dkk, 2021).

Pemerintah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 memiliki kewenangan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi unggulan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus barengi dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya alam yang disertai kemampuan masyarakat dalam mengelolanya

dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada secara optimal. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat menentukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah melalui penentuan sektor unggulan yang dimiliki sebagai salah satu bentuk upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Komoditas unggulan menurut Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Depdagri (1999) memiliki beberapa kriteria yaitu 1) mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif 2) mempunyai daya saing tinggi di pasaran baik ciri, kualitas maupun harga yang kompetitif serta jangkauan pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global 3) mempunyai ciri khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak (tenaga kerja setempat) 4) mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku yang cukup banyak, stabil dan berkelanjutan 5) mempunyai nilai tambah yang tinggi, baik dalam kemasan maupun dalam pengolahannya 6) secara ekonomi, komoditas menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat 7) komoditas yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat.

Dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah, salah satu aspek yang diperhitungkan adalah kemampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien. Hal ini ditentukan oleh kapasitas dan ketersediaan sumberdaya dan mutu sumberdaya. Pembangunan ekonomi dapat diukur melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Indonesia pada dasarnya terdiri atas 17 (tujuh belas) sektor, yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan listrik dan gas; (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (6) konstruksi; (7) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (8) transportasi dan pergudangan; (9) penyediaan akomodasi dan makan minum; (10) informasi dan komunikasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) real estate; (13) jasa perusahaan; (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (15) jasa pendidikan; (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan (17) jasa lainnya.

Tabel 1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Beberapa Sektor di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021 (Rp 000)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	7.780	8.031	8.157	8.136	8.440
Industri pengolahan	1.655	1.818	1.988	1.946	1.994
Konstruksi	1.918	2.063	2.238	2.118	2.250
Perdagangan besar dan Eceran	4.482	4.699	5.040	4.665	4.810
Informasi dan Komunikasi	1.035	1.138	1.263	1.594	1.715
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	962	980	1.014	961	943
Jasa Pendidikan	1.457	1.604	1.692	1.774	1.775
Produk Domestik Bruto	22.063	23.321	24.587	24.345	25.179

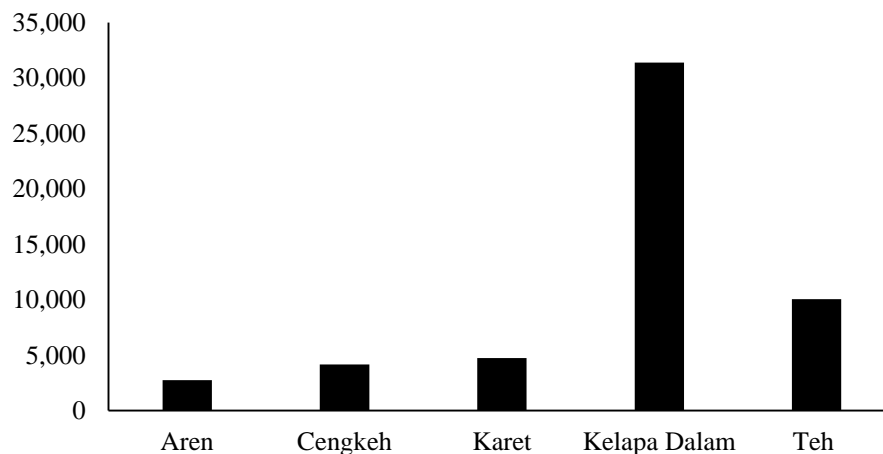
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2022 (diolah)

Tabel 1 menjelaskan bahwa PDRB Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 23.898.979,774 juta rupiah. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2021 adalah sektor pertanian dengan rata-rata Rp8.108.900.412 juta rupiah per tahun. Angka yang dimiliki sektor pertanian relatif stabil dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 namun sektor pertanian masih tetap menempati posisi tertinggi dalam kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya. Selisih yang dimiliki sektor pertanian dengan sektor lain pun cukup besar sehingga menandakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mampu bertahan dalam menghadapi perubahan ekonomi di masa pandemi dan menjadi sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat pentingnya peran sektor pertanian bagi perekonomian, maka pembangunan pertanian perlu terus dikembangkan untuk menciptakan pertanian yang unggul dan berkelanjutan yang dapat menciptakan nilai tambah (*added value*) produk pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani (Nursan, 2020).

Kurniawan (2016) menyatakan pembangunan daerah berbasis komoditas unggulan dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui komoditas unggulan digunakan teori ekonomi basis yang mengklasifikasikan semua kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan masyarakat yang hasilnya berupa barang atau jasa yang ditujukan untuk ekspor keluar atau berorientasi keluar wilayah. Kegiatan non basis adalah kegiatan masyarakat yang hasilnya berupa barang atau jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonominya.

Komoditas perkebunan menjadi salah satu sub sektor pertanian andalan yang memiliki pengaruh tinggi dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Peran komoditas unggulan dapat dilihat dari jumlah produksi dan penyerapan tenaga kerja sehingga berkontribusi terhadap pembentukan PDRB. Komoditas perkebunan yang memiliki luas lahan dan jumlah produksi tinggi di Kabupaten Tasikmalaya berpotensi untuk menjadi komoditas unggulan seperti aren, cengkeh, karet, kelapa, dan teh.



Gambar 1 Luas Lahan Komoditas Perkebunan Tertinggi di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya 2022

Gambar 1 menjelaskan bahwa komoditas kelapa dalam merupakan komoditas perkebunan yang memiliki lahan terluas di Kabupaten Tasikmalaya dengan luas

lahan 31.300,6 hektar bahkan menjadi salah satu sentra kelapa di Jawa Barat. Komoditas yang memiliki luas lahan terbesar setelah kelapa yaitu komoditas perkebunan teh dengan luas rata-rata 10.063,6 hektar yang kerap kali menjadi tempat wisata masyarakat sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Perkebunan karet memiliki luas lahan yang cenderung menurun sejak 2017 hingga 2021 dengan luas rata-rata 5.675,2 hektar berbeda dengan luas lahan perkebunan cengkeh dan aren yang mengalami peningkatan sejak 2017 hingga 2021 dengan rata-rata luas lahan perkebunan cengkeh 3.975 hektar dan 2.584,6 hektar untuk perkebunan aren.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari kontribusi sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Luas lahan komoditas kelapa dalam di Kabupaten Tasikmalaya merupakan lahan terluas kedua setelah Kabupaten Ciamis di Jawa Barat tetapi secara produksi lebih rendah dari Kabupaten Kuningan yang memiliki luas lahan lebih rendah, sedangkan pada komoditas teh yang merupakan lahan terluas ke-4 di Jawa Barat tetapi dalam segi produksi menduduki peringkat ke-3 di Jawa Barat.

Penelitian sebelumnya pada tahun 2021 menyatakan bahwa komoditas unggulan di Kabupaten Tasikmalaya adalah komoditas aren dan kelapa dengan penggunaan data hingga tahun 2019. Dimana hasil ini merupakan komoditas unggulan sebelum terjadinya pandemi, untuk itu diperlukanya analisis komoditas unggulan setelah masa pandemi untuk mengetahui komoditas yang bertahan akibat pembatasan distribusi di masa pandemi covid-19.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan gerakan penanaman komoditas unggulan pada subsektor tanaman hortikultura pada tahun 2019 sedangkan belum ditentukan komoditas unggulan pada subsektor perkebunan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya. Komoditas perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya tersebar di 39 kecamatan sehingga dibutuhkan analisis untuk mengenali potensi komoditas perkebunan dan sebarannya yang dihasilkan di setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya agar diketahui komoditas perkebunan yang termasuk dalam komoditas basis, pertumbuhan dan kontribusi produksi komoditas perkebunan dan komoditas yang memiliki daya saing tinggi untuk dipertimbangkan

sebagai komoditas yang dapat diunggulkan dan menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan perekonomian atau pendapatan daerah. Atas dasar permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan analisis komoditas perkebunan unggulan dan sebarannya di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pertimbangan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komoditas perkebunan apakah yang menjadi komoditas basis dan bagaimana sebarannya di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan komoditas perkebunan dan sebarannya di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana daya saing komoditas perkebunan dan sebarannya di Kabupaten Tasikmalaya?
4. Komoditas perkebunan apakah yang dapat menjadi komoditas unggulan dan bagaimana sebarannya di Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis komoditas perkebunan basis dan sebarannya di Kabupaten Tasikmalaya
2. Menganalisis klasifikasi pertumbuhan perekonomian komoditas perkebunan dan sebarannya di Kabupaten Tasikmalaya
3. Menganalisis daya saing komoditas perkebunan dan sebarannya di Kabupaten Tasikmalaya
4. Mengidentifikasi komoditas unggulan dan sebarannya di Kabupaten Tasikmalaya

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait komoditas unggulan pada subsektor perkebunan, serta sebagai bentuk aplikasi teori yang diperoleh dari pembelajaran selama masa perkuliahan.

2. Bagi Petani

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi petani kebun dalam menentukan komoditas yang akan di budidayakan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan kebijakan daerah pada komoditas unggulan subsektor perkebunan.

4. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dalam mengembangkan penelitian yang lebih dalam terkait komoditas unggulan subsektor perkebunan sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya.